



Bansos Mentah Lagi, DPRD Bali Datangi Gubernur

★ Kadek Diana: Gubernur Bilang Sudah Tidak Ada Masalah Lagi

DENPASAR, NusaBali

Unsur Pimpinan DPRD Bali ramai-ramai datangi Gubernur Made Mangku Pastika di kantornya, Niti Mandala Denpasar, Senin (2/11) siang. Kedatangan jajaran Pimpinan Dewan ini lantaran masalah pencairan bantuan sosial (bansos)/hibah kembali mentah, meskipun sebelumnya sempat muncul lampu hijau menggunakan payung hukum Peraturan Gubernur (Pergub).

Sebelum unsur Pimpinan Dewan mendatangi Gubernur Pastika, sempat terjadi ketegangan antara legislatif dan

eksekutif dalam pertemuan tertutup di Sekretariat DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Senin pagi. Saat pertemuan tertutup di Sekretariat DPRD Bali, jajaran eksekutif diwakili Plt Karo Hukum Setda Provinsi Bali yang juga Asisten I Provinsi Bali, Dewa Putu Eka Wijaya Wardana.

Pertemuan tertutup di Sekretariat DPRD Bali yang berlangsung selama 1,5 jam sejak pagi pukul 10.00 Wita hingga

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Bansos Mentah Lagi, DPRD Bali Datangi Gubernur

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

siang pukul 11.30 Wita itu dipimpin langsung Ketua Dewan Nyoman Adi Wiryatama. Pertemuan juga dihadiri Pimpinan Dewan dari unsur Fraksi, Komisi, Badan Kehormatan, dan Badan Legislasi (Baleg) DPRD Bali.

Dalam pertemuan di Sekretariat DPRD Bali tersebut, dibahas kembali Pergub dan Surat Edaran (SE) Mendagri tentang penerima bansos yang harus lembaga berbadan hukum. DPRD Bali berinisiatif memanggil Plt Karo Hukum Setda Provinsi, Dewa Putu Eka Wijaya Wardana, sekaligus sebagai persiapan jelang kedatangan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Otda Kemendagri) ke Bali, 7 November 2015 depan. Kedatangan Dirjen OtDa Kemendagri nanti sebagai ajang penyamaan persepsi tentang pencairan bansos.

Informasi dari kalangan Dewan, pertemuan tertutup antara eksekutif dan legislatif di Sekretariat DPRD Bali berlangsung panas. Pasalnya, Pergub hasil verifikasi Mendagri yang dibawa Dewa Putu Eka Wijaya Wardana dari Jakarta, tidak bisa untuk mencairkan bansos. Karenanya, eksekutif dianggap main-main.

"Eksekutif (Gubernur) dan Dewan kan sama-sama dipilih rakyat. Ya, sama-samalah berkomitmen," ujar anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Gianyar, Wayan Disel Astawa, didampingi rekannya sesama politisi PDIP dari Dapil Gianyar, Kadek Diana, Senin kemarin.

Saat itu pula, Kadek Diana bergegas mengambil buku dan koran di mejanya dalam Ruang Komisi III DPRD Bali. Politisi asal Desa/Kecamatan Sukawati, Gianyar ini mengatakan 'tak boleh setengah-setengah urusan bansos'.

"Bocok (malu) kita di hadapan rakyat. Semua sudah verifikasi dan aturan hukumnya jelas," tandas Kadek Diana.

Sementara, salah satu Pimpinan Fraksi DPRD Bali mengatakan Dewan mendatangi Gubernur Pastika, karena penerima bansos yang sudah mengajukan proposal melalui panitia pembangunan pura dan sebagainya, harus juga terdaftar sebagai lembaga berbadan hukum. Padahal, proposal yang mencantumkan panitia pembangunan pura ini sudah maju ke eksekutif dan diverifikasi dalam Perda APBD di Mendagri. Logikanya, lanjut dia, sudah lolos verifikasi dan tidak ada masalah lagi. "Ini jadi bolak-balik, sekarang kita ke Kantor Gubernur saja," ujarnya.

Hasil pertemuan antara Pimpinan Dewan dan Gubernur Pastika lantas diumumkan dalam Rapat Gabungan Pansus APBD Induk 2016

dan Pansus Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Bali di DPRD Bali, Senin sore sekitar pukul 15.00 Wita. Hasil pertemuan diumumkan oleh anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Gianyar, I Kadek Diana.

Menurut Kadek Diana, dalam pertemuan dengan Gubernur Pastika, tidak ada masalah lagi terkait pencairan bansos. "Tadi Pak Gubernur Pastika ketika ketemu Pimpinan Dewan di Kantor Gubernur, menyampaikan tidak ada masalah lagi," ujar Kadek Diana.

Kadek Diana juga sekalian menirukan ucapan Gubernur Pastika. "Sambil melihat kalender kecil, Gubernur Pastika menyampaikan, 'Kalau begini, minggu depan sudah harus cair. Kalau tidak bisa menjadi kayak kasus hibah tahun 2013'," tandas Kadek Diana disambut tapuk tangan anggota Dewan lainnya. **nat**

Edisi : Selasa, 3 November 2015

Hal : 1 dan 15



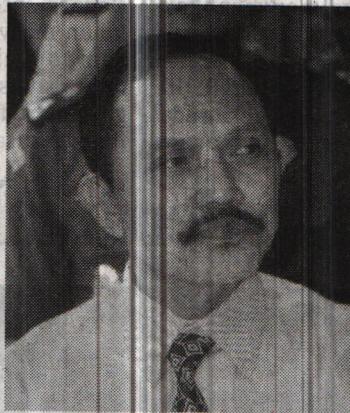
Bansos Rp 11,08

Miliar Bermasalah

Hibah bansos tahun 2013 itu yang memunculkan banyak korban terjerat pidana, seperti di Dinas Kehutanan dan Perkebunan, hingga Dinas Pertanian Karangasem.

AMLAPURA, NusaBali

Hibah bantuan sosial (bansos) yang terdiri atas 170 paket di tahun 2013 lalu dengan total nilai Rp 11,08 miliar diketahui bermasalah. Realisasinya melanggar ketentuan Permendagri No 39 tahun 2012. Mestinya usulan hibah bansos tercantum dalam KUA PPS (Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Se-



I Gede Adnya Muliadi

mentara) 2012 untuk APBD 2013. Kenyataannya, anggaran secara gelondongan langsung tercantum di APBD 2013, dan permohonannya menyusul.

Hibah bansos itulah yang memunculkan banyak korban, terjerat pidana, seperti yang terjadi di Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan di Dinas Pertanian Tanaman

Pangan dan Hortikultura Karangasem. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Karangasem I Gede Adnya Muliadi mengakui, realisasi hibah bansos tahun 2013 lalu banyak bermasalah.

Adnya Muliadi memaparkan hal itu di Amlapura, Senin (2/11). Realisasi hibah bansos Rp 11,08 miliar yang telah tercantum dalam APBD 2013, disahkan 7 Januari 2013, tetapi permohonannya setelah APBD sah, dengan kajian dan rekomendasi tanggal mundur.

"Memang realisasi hibah bansos saat itu menyalahi ketentuan, yang berlaku. Anggaran terlebih dahulu masuk dalam APBD, selanjutnya menyusul permohonan melalui proposal. Mestinya permohonan dulu datang, kemudian masuk usulan," jelasnya.

Tercatat 170 paket hibah bansos: Dinas PU 69 paket senilai Rp 6,36 miliar; Disdikpora 6 paket Rp 300 juta, Dinas Perhubungan 8 paket Rp 545 juta, Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan 29 paket Rp

Edisi : Selasa, 8 November 2015

Hal : 8



1,435 miliar, Dinas Kehutanan dan Perkebunan 43 paket Rp 1,5 miliar, Dinas Budpar 2 paket, BPMPD 2 paket, Kesbangpol dan Linmas 1 paket Rp 50 juta, Dinas Sosial 2 paket Rp 140 juta, Bagian Ekonomi 1 paket Rp 50 juta, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana daerah) 2 paket Rp 400 juta dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 4 paket Rp 100 juta, total 170 paket senilai Rp 11,08 miliar.

Gara-gara hibah bansos itu, menimbulkan dua terpidana di Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan dua tersangka di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Misalnya di Dinas Hutbun dari 43 paket, termasuk 27 paket kelompok tani senilai Rp 1,22 miliar tidak tercantum di KUA PPAS 2012. Setelah APBD 2013 disahkan per 7 Januari 2013, tiba-tiba akhir Januari 2013 muncul daftar 27 kelompok tani penerima hibah bantuan bibit, tanpa disertai proposal, kajian teknis dan SK Bupati.

Agar hibah cair, maka kelompok tani membuat proposal dengan tanggal mundur, atas bantuan petugas penyuluh dan KUPT. Maka terbitlah SK Bupati No 93/HK/2013 per 2 Januari 2013. Anahnya lagi naskah perjanjian hibah antara ketua kelompok dengan Kadishutbun I Ketut Mudita, No 900/277/Dishutbun, per 9 April 2013, di saat realisasi hibah tengah berjalan.

Kali ini menyusul berlakunya UU No 23 tahun 2014, hibah bansos hanya untuk lembaga berbadan hukum Indonesia. "Makanya hibah bansos kali ini hanya untuk lembaga berbadan hukum Indonesia, seperti PMI, Pramuka, ormas pemuda," kata Adnya Muliadi.

Mantan Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kali ini sebagai Kadis Hut bun I Komang Subratayasa juga membenarkan hal itu. "Hibah itu memang tidak sesuai mekanisme," kata Subratayasa. **k16**

Edisi : Selasa, 8 November 2015

Hal : 8



Siap Disidangkan Dua Tersangka

Harga tanah yang saat itu diperkirakan hanya Rp 5 juta, setelah dilakukan appraisal tanah melambung menjadi Rp 18,5 juta hingga negara dirugikan sebesar Rp 5,22 miliar.

SINGARAJA, NusaBali

Kasus dugaan mark up harga lahan kampus Fakultas Olahraga dan Kesehatan (FOK) Undiksha Singaraja di Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, segera memasuki babak baru. Dua tersangka dengan berkas berbeda masing-masing I Nyoman Mustiara dan Wayan Suarsa, segera bakal disidang.

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejari) Bali, telah melimpahkan kedua tersangka beserta berkas pemeriksaan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Singaraja, Senin (2/11) siang. Kejari Singaraja pun dalam waktu dekat melimpahkan berkas kedua tersangka tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Denpasar, untuk persidangan lebih lanjut.

Kedua tersangka selama ini telah menjalani penahanan di LP Singaraja, sejak ditetapkan sebagai tersangka. Kedua tersangka dibawa ke kantor Kejari Singaraja, sekitar pukul 10.00 wita dalam pelimpahan tahap dua. Dalam pelimpahan itu, kedua tersangka didampingi



NYOMAN Mustiara saat digiring menuju mobil tahanan.

oleh masing-masing kuasa hukumnya. Pelimpahan sengaja dilakukan di Kejari Singaraja, mengingat lokus delicti atau lokasi kejahatan berada di Kabupaten Buleleng.

Kedua tersangka terlihat santai sambil menunggu proses pemberkasan. Mereka berdiam diri di salah satu ruangan yang ada di Seksi Pidana Khusus Kejari Singaraja, dan didampingi oleh

kuasa hukum masing-masing. Mustiara didampingi Ketut Ngastawa, sementara Suarsa didampingi Made Sudana.

Proses pemberkasan berjalan cukup lama dan tertutup. Keduanya baru dibawa turun dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 13.30 siang, dan langsung dibawa kembali ke Lapas Singaraja.

Kali ini keduanya kembali

menjalani penahanan untuk 20 hari kedepan, dibawah pengawasan jaksa penuntut umum. Dalam persidangan nanti, keduanya akan berhadapan dengan empat jaksa penuntut umum, yakni Ida Ketut Alit, Dr. Akmal Kodrat, I Wayan Suardi, dan Putu Gede Suriawan.

Kasi Pidsus Kejari Singaraja I Gede Widhartama mengatakan,

kedua tersangka dilimpahkan dalam dua berkas berbeda, namun masih dalam perkara yang sama. Yakni dugaan penggelembungan harga tanah untuk kampus Universitas Pendidikan Ganesha di Desa Jinengdalem, pada tahun 2010 lalu. "Keduanya perannya berbeda. Tersangka Suarsa berperan sebagai ketua panitia pengadaan lahan. Kalau Mustiara, sebagai penjual. Makanya berkasnya beda," jelas Widhartama.

Dugaan mark up harga tanah untuk pengadaan kampus Fakultas Olahraga dan Kesehatan (FOK) Undiksha Singaraja, diduga terjadi pada tahun 2010 lalu. Harga tanah saat itu diperkirakan hanya Rp 5 juta. Namun setelah dilakukan appraisal, harga tanah melambung menjadi Rp 18,5 juta. Akibat kejadian itu, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 5,22 miliar.

Sementara Nyoman Mustiara mengaku cukup sehat selama menjalani penahanan. Bahkan siap menjalani persidangan. "Sehat, sehat, tetap sehat, agar sidang segera saja," ujarnya dengan senyum khasnya.

Kuasa hukumnya Ketut Ngastawa menyatakan, pihaknya sengaja tidak mohon penangguhan penahanan terhadap kliennya. Pihaknya ingin proses persidangan segera dimulai untuk membuktikan kasusnya. "Kami tidak minta pen-

angguhan penahanan, kami ingin kasus ini segera tuntas. Bagi kami, klien kami tidak salah, karena dia hanya menjual ketika sudah ada kesepakatan. Apa salah, kalau menjual, sepanjang sudah ada kesepakatan harga, jual beli itu tidak ada persoalan, dan harga tanah di Bali sangat fluktuatif," jelasnya. **k19**

Edisi : Selasa, 3 NOV 2010

Hal : 4



SKPD Penghasil Diminta Optimalkan Pendapatan

★ Trans Sarbagita Masih Minus Rp7 Miliar

DENPASAR, NusaBali

Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang masuk kategori penghasil dapat mengoptimalkan pendapatan untuk mengejar target pendapatan Rp3,35 triliun pada 2016. "Adanya peningkatan pendapatan, tidak hanya bersumber dari Dinas Pendapatan Provinsi Bali berupa



• IST
GUBERNUR Pastika.

pajak namun juga berasal dari SKPD penghasil lainnya," kata Pastika saat memimpin rapat terkait PAD, di Denpasar, Senin (2/11).

Menurut dia, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, hanya ada dua hal yang dapat dilakukan yaitu mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. "Hanya dengan dua upaya tersebut kesejahteraan dapat diperoleh," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Pastika juga menyoroti tentang target serta realisasi pendapatan tahun 2015 dari beberapa SKPD penghasil. Biro Aset dinilai belum memberikan pendapatan yang signifikan mengingat masih banyaknya tanah milik Pemprov Bali yang tersebar di kabupaten/kota yang pengelolaannya belum optimal.

Oleh karena itu, ia menginstruksikan agar segera melakukan perubahan perda tentang pemberian hak kabupaten/kota untuk mengelola aset provinsi sehingga kewenangan pengelolaannya dikembalikan ke pihak provinsi.

Dengan demikian, ia yakin aset Pemprov Bali yang luasnya sekitar 9.000 hektare yang tersebar di kabupaten/kota pemanfaatannya akan lebih optimal sehingga dapat menambah pendapatan.

Pastika juga meminta Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali agar mengoptimalkan pendapatan yang berasal dari bus Trans Sarbagita. Mengingat hingga saat ini moda transportasi massal ini baru bisa menyumbangkan Rp3 miliar sedangkan biaya operasional yang dihabiskan mencapai Rp10 miliar. "Dari Trans Sarbagita pendapatan masih minus Rp7 miliar, kalau memang perlu naikkan harga tiket tahun depan," ucapnya. ant

Edisi : Selasa, 3 November 2015

Hal : 3